



USAHA PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN ASPEK MANAJERIAL USAHA PRAKOPERASI**Oleh****Mulyaningtyas¹⁾, Mariana Puspa Dewi²⁾, Justita Dura³⁾ & Fadilla Cahyaningtyas⁴⁾****^{1,2,3,4}Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang****E-mail: ¹mulyaningtyas.74@gmail.com**

Article History:

Received: 19-04-2021

Revised: 15-05-2021

Accepted: 21-05-2021

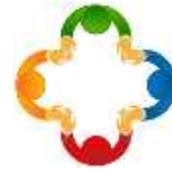
Keywords:*Prakoperasi, Kelembagaan & Manajerial koperasi*

Abstract: *Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang menganut azas keadilan dan kesetaraan, tetapi sangat disayangkan jika pengelolaannya kurang optimal. Mitra dalam pengabdian ini adalah Prakoperasi PKK RW XI Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang beralamat di Jl. Silikat Kota Malang. Prakoperasi PKK RW IX Kelurahan Purwantoro adalah suatu koperasi wanita yang beranggotakan ibu-ibu masyarakat RW XI kelurahan Purwantoro tetapi belum berbadan hukum sehingga kemudian disebut dengan Prakoperasi. Memiliki visi menjadi Lembaga usaha (Koperasi) yang berorientasi pada kesejahteraan anggotanya dan menjadi inklusi keuangan bagi usaha kecil yang dijalankan oleh anggotanya. Masalah yang dihadapi mitra yaitu kesulitan dalam merumuskan tugas dan tanggung jawab pengurus serta dalam menggali potensi usaha prakoperasi dikarenakan kurang paham tentang kelembagaan dan aspek manajerial. Tim Mengusulkan pengabdian dalam bentuk pelatihan dan pengabdian yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada para pengurus dan anggota Prakoperasi mengenai Kelembagaan dan aspek manajerial yang sangat penting untuk pengembangan pengelolaan dan kepengurusan koperasi.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian di Indonesia, tiga pelaku ekonomi yang berperan serta adalah: sektor Perusahaan Negara, sektor Swasta, dan sektor Koperasi. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 menyatakan: Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang — seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun usaha yang dapat ditangani oleh Koperasi tercantum pada pasal-3, yang menyatakan:

1. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang



kehidupan ekonomi rakyat.

Program penggalakan koperasi sebagai wujud pemberantasan kemiskinan berjalan dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten/kota. Pemerintah melaksanakan beberapa program yang ditujukan untuk dapat menstimulus perkembangan koperasi tersebut. Salah satu program pemerintah yang cukup efektif dilakukan adalah memberikan modal usaha kepada koperasi-koperasi yang telah ada maupun koperasi-koperasi yang baru tumbuh. Agar usaha koperasi bisa berjalan dengan baik, maka pengelola koperasi perlu memahami aspek-aspek manajerial usaha. Salah satunya yang dianggap penting adalah permasalahan jaringan pemasaran dan tanggap terhadap peluang usaha. Sebagian besar koperasi mengawali usahanya dengan membuka usaha simpan pinjam untuk anggotanya, tetapi dikarenakan lemahnya manajerial koperasi maka dari tahun ke tahun usaha simpan pinjam tersebut tidak mengalami perkembangan dan cenderung merugi. Padahal jika melihat pada peluang yang ada, koperasi sangat dimungkinkan untuk mengembangkan usahanya dibidang perdagangan karena rata-rata anggota koperasi memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama. Demikian juga dengan jaringan pemasaran, koperasi dapat menjadi wadah bagi para anggotanya yang memiliki usaha untuk memasarkan produk anggota bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain sehingga timbulah kemitraan antar koperasi.

Untuk mendukung usaha koperasi, maka kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangatlah penting untuk dilakukan secara berkesinambungan, semua hal yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja koperasi dicatat secara rinci dan diproses menjadi laporan keuangan sesuai standar yang berlaku sehingga pertanggungjawaban dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian kesehatan koperasi dari satu periode ke periode berikutnya dapat dipantau, Karena penilaian/pengukuran kesehatan koperasi tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya data yang termuat didalam laporan keuangan.

Agar keberadaan dan kelangsungan usaha koperasi bisa seperti yang diharapkan, maka peran serta berbagai pihak sangatlah dibutuhkan. Khususnya peran pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan koperasi, baik dalam bidang kelembagaan perkoperasian, pengembangan usaha, dan tata kelolah (manajerial) koperasi.

Guna menghadapi tantangan tersebut maka pelatihan/ Penyuluhan ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan pengurus dan anggota prakoperasi PKK RW 011 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang dalam mempersiapkan kelembagaan koperasi dan aspek manajerialnya sehingga diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengembangkan prakoperasi menjadi koperasi yang berdaya saing dan mampu mensejahterakan anggotanya.

Masalah yang dihadapi mitra yaitu kesulitan dalam mengorganisir tugas dan tanggung jawab para pengurus prakoperasi serta dalam melakukan pengembangan usaha dikarenakan masih minimnya pengetahuan para pengurus dan anggota prakoperasi tentang Kelembagaan dan manajerial koperasi.

Prakoperasi adalah Bentuk usaha yang dijalankan dengan prinsip-prinsip koperasi tetapi belum berbadan hukum, aktivitas yang dimiliki masih terbatas pada salah satu kegiatan usaha koperasi yaitu usaha simpan pinjam. Para anggota rutin menabung/ menyimpan uang di prakoperasi setiap bulannya. Tabungan yang terkumpul kemudian disalurkan sebagai pinjaman untuk para anggotanya yang membutuhkan baik untuk modal



usaha, dana sekolah ataupun konsumsi rumahtangga. Dari aktifitas ini maka prakoperasi memperoleh pendapatan bunga dan administrasi, yang kemudian dapat menjadi sumber pembiayaan operasional usaha prakoperasi setiap tahun dan sisanya dibagikan pada anggota prakoperasi sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) di tahun berikutnya.

Keberadaan prakoperasi memiliki peran penting sebagai inklusi keuangan masyarakat utamanya yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dan yang tidak bankable. Penguatan kelembagaan dan aspek manajerial merupakan upaya peningkatan kemampuan prakoperasi menjadi koperasi yang diharapkan dapat lebih mensejahterakan anggota yang tergabung didalamnya.

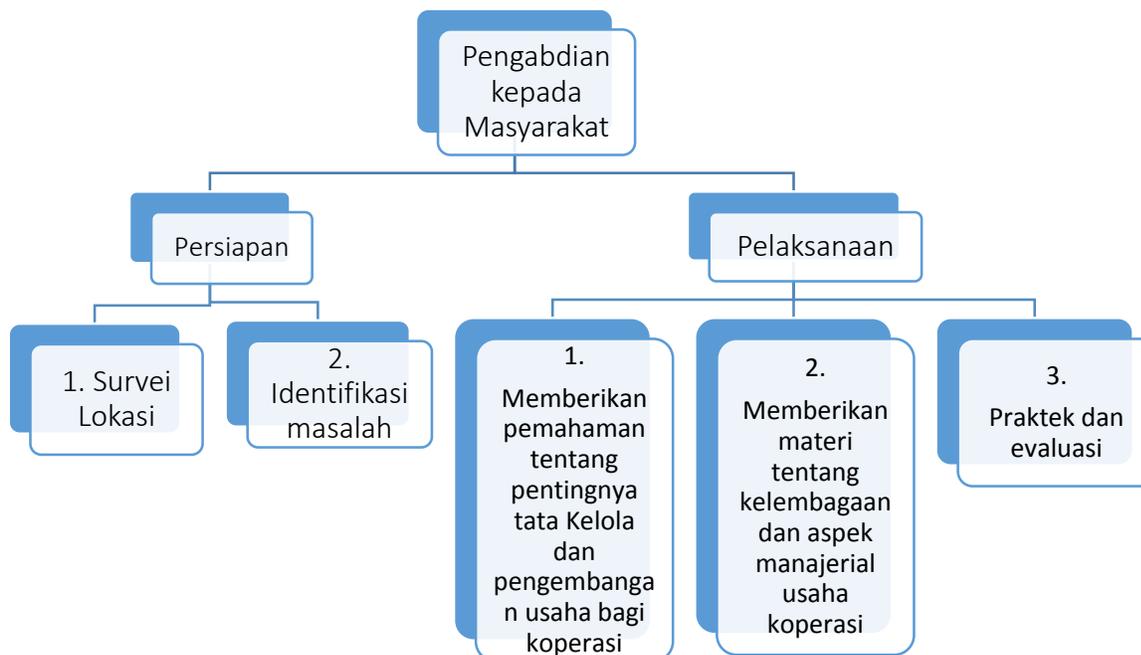
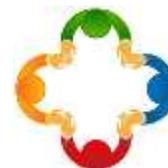
Pendekatan penguatan (empowerment) ini disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan anggota seperti:

1. Kebutuhan akan modal usaha
2. Kebutuhan akan barang/ bahan dengan harga yang bersaing
3. Kebutuhan akan tambahan pendapatan keluarga

Keberadaan Prakoperasi telah menjadi jawaban bagi kelompok masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan diskusi tentang Kelembagaan dan aspek manajerial usaha kepada Pengurus dan perwakilan anggota Prakoperasi PKK RW XI Kelurahan Purwantoro Kota Malang. Lokasi pengabdian kepada masyarakat berjarak 3(tiga) km dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, tepatnya berada di jalan Silikat Kelurahan Purwantoro, kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 10 April 2021. Pada pukul 10.00 WIB. Pelatihan ini menggunakan pendekatan penyampaian materi, diskusi, praktek dan evaluasi. Berisi deskripsi tentang proses perencanaan aksi bersama komunitas (pengorganisasian komunitas). Tahap Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Tahap Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL

Pada proses pengabdian masyarakat ini terdapat dua tahap, tahap pertama adalah persiapan dimana tim pengabdian masyarakat melakukan survey terhadap calon mitra pengabdian untuk mengetahui kebutuhan calon mitra akan adanya pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian. Pada tahap ini diperoleh kesepakatan antara tim pengabdian kepada masyarakat dan kelompok masyarakat RW XI Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing kota Malang yang tergabung dalam Prakoperasi PKK. peserta yang terdiri dari pengurus dan perwakilan anggota prakoperasi, menampakkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap pendampingan berupa pelatihan yang ditawarkan Sehingga kemudian disusunlah jadwal kegiatan pelatihan yang akan dihadiri para pengurus dan perwakilan anggota prakoperasi.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Diawali dengan penyampaian materi tentang kelembagaan dan aspek manajerial koperasi dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Berbagai hal terkait masalah kelembagaan dan aspek manajerial usaha didiskusikan dan dievaluasi Bersama dengan tim pengabdian kepada masyarakat.

Langkah-langkah penguatan kelembagaan dirumuskan, seperti tugas dan tanggung jawab pengurus menjadi lebih detail sehingga tiap pengurus menjadi paham akan perannya masing-masing dalam Prakoperasi. Potensi usaha yang dimiliki prakoperasi digali dan didiskusikan dengan harapan prakoperasi menjadi jawaban akan kebutuhan anggotanya dalam menaikkan kesejahteraan dan menjadi inkusi keuangan untuk mendukung permodalan usaha anggotanya yang banyak berwirausaha dan termasuk usaha kecil yang belum bankable. Pada tahap terakhir pelaksanaan dilakukan evaluasi atas praktek penyusunan tugas dan tanggung jawab terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi guna memaksimalkan usaha penguatan kelembagaan dan aspek manajerial prakoperasi.



DISKUSI

Diskusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dititik beratkan pada permasalahan tata Kelola dan pengembangan usaha koperasi. Kegiatan usaha yang masih terbatas pada usaha simpan pinjam dikelola dengan struktur organisasi yang sederhana pula sehingga pengurus yang aktif hanya ketua, bendahara dan bagian pembukuan saja. Sementara jika dilihat pada banyaknya simpanan anggota yang terkumpul diprakoperasi dan kebutuhan anggota prakoperasi yang cukup beragam namun homogen, maka prokoperasi ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan bentuk usaha dari simpan pinjam menjadi serba usaha. Potensi tersebut dapat dikelola jika kelembagaan prakoperasi dibenahi dan dikuatkan kembali sehingga peran pengurus menjadi lebih maksimal dan harapan dari prakoperasi ke Koperasi dapat segera terwujud.

Dalam manajerial usaha koperasi juga dianggap penting untuk menjalin kemitraan, terlebih jika usaha koperasi dimaksudkan untuk berkembang menjadi koperasi serba usaha. Dari hasil diskusi ditemukan beberapa potensi kemitraan anggota dibawah naungan koperasi, terdapat beberapa kelompok anggota yang memiliki kebutuhan yang homogen sehingga dengan naungan koperasi maka kebutuhan anggota dapat dipenuhi dengan lebih mudah dan murah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. (Hafsah, 2003)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Mitra pengabdian membutuhkan pendampingan untuk dapat memahami bagaimana tata Kelola dan manajerial usaha yang baik untuk dapat memajukan prakoperasi kearah terciptanya koperasi seperti yang di harapkan oleh para anggotanya.
2. Pengabdian dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dengan disertai diskusi, praktek dan evaluasi memberikan peningkatan pemahaman pada mitra dampingan dalam hal ini Prakoperasi PKK RW XI keluran Purwantoro menghasilkan pemahaman yang baik, namun untuk pelaksanaan usaha penguatan masih harus didampingi selama beberapa waktu dikarenakan usaha penguatan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Atas terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Risa Santoso, BA.,M.Ed, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.
2. Ibu Dr. Ike Kusdyah rachmawati, SE.,MM, Ketua LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
3. Ibu Feti Maisaroh, SE, Ketua Prakoperasi PKK RW XI Kelurahan Purwantoro Malang
4. Segenap Pengurus dan Anggota Prakoperasi PKK RW XI Kelurahan Purwantoro Malang



DAFTAR REFERENSI

- [1] Fifi Hasmawati. Manajemen Koperasi. Penerbit Duta Azhar . Medan, 2013
- [2] Muhamad Jafar Hafsah, Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi, Jakarta 2003: Penerbit Pustaka sinar harapan
- [3] Oka Sofyan hidayat, Pengembangan Sistem dan Penguatan manajemen Koperasi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 22 No 4 Edisi Khusus SNEHPKM 2016 (26-33)
- [4] Meilanny Budiarti Santoso, Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Petani Tembakau di Desa Genteng Kecamatan Sukarsari Sumedang, Jurnal Penelitian dan PKM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, UNPAD.(129-389)
- [5] Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012, Perkoperasian